

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Aset tetap merupakan komponen yang signifikan dalam neraca perusahaan. Aset tetap bersifat *tangible* dan digunakan dalam jangka panjang. Dalam PSAK 16 aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap mempunyai nilai yang sangat material yakni dalam perolehannya perusahaan membutuhkan dana cukup besar, sehingga investasinya dapat mempengaruhi pelaksanaan keuangan selama satu periode akuntansi atau lebih. Banyak instansi serta perusahaan-perusahaan yang padat modal melakukan investasi yang besar jumlahnya pada berbagai aset tetap, misalnya aset tetap sebuah perusahaan seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan dan peralatan. Pada umumnya barang-barang semacam itu mempunyai harga yang relatif mahal, maka tidak mengherankan bila nilai rupiah aset tetap perusahaan seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset lainnya.

Pengelolaan aset tetap merupakan hal yang penting bagi kesehatan keuangan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena aset yang dimiliki perusahaan juga digunakan sebagai alat yang memberikan petunjuk terhadap perkembangan kekayaan perusahaan terutama dalam hal perhitungan

tingkat rasio likuiditas juga rasio solvabilitas, karena dasar perhitungannya adalah aktiva. Dengan diketahuinya rasio perusahaan yang bagus maka akan semakin banyak pihak luar yang percaya terhadap kinerja perusahaan.

Mengingat penting dan besarnya pengaruh aset tetap dalam menunjang tujuan perusahaan dalam menghasilkan laba maupun menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka diperlukan suatu kebijakan atas pengelolaan aset tetap yang cermat dari pimpinan perusahaan serta pencatatan akuntansi seteliti mungkin, mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, sampai penyajian laporan keuangan.

Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan pajak Kota Bandung. Dinas Pelayanan Pajak memiliki tugas penting untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan daerah Kota Bandung. Untuk melakukan kebijakan operasional tersebut maka diperlukan kegiatan pengadaan dan pengeluaran barang sebagai penunjang terlaksananya kebijakan operasional.

Setelah diperolehnya aset tetap berwujud, perlu pengelolaan oleh instansi. Aset tetap yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak akuratnya laporan keuangan instansi sehingga tidak mencerminkan kondisi instansi yang sebenarnya dan tanpa disadari menimbulkan kerugian yang besar bagi instansi.

Pengelolaan aset tetap berwujud di Dinas Pelayanan Pajak adalah suatu proses melakukan kegiatan, merumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap aset tetap setelah aset tersebut benar-benar sudah digunakan

dalam kegiatan operasional perusahaan untuk tujuan pelaporan keuangan.

Aset membutuhkan manajemen yang baik agar lebih mudah untuk dipantau dan ditelusuri.

Adapun perhitungan aset tetap dengan menggunakan Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMDA) diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyebutkan :

1. Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai,
2. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan **Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**, dengan tugas:

1. Mengembangkan dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke *grand design Data Base Management System (DBMS)*.

2. Memberikan bimbingan teknik/pelatihan kepada satuan petugas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

- a. Menyediakan *Data Base* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparat daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah;
- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan;
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik;
- d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) yang berlokasi di Jalan Wastukencana No.2 Bandung untuk mengetahui tentang sistem yang digunakan pada Instansi tersebut.
Dari latar belakang diatas untuk menyusun tugas akhir ini, penulis mengambil

judul : **TINJAUAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) KOTA BANDUNG**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung?
2. Hambatan apa saja dalam Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Maksud penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh uji sidang Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Ekuitas (STIE EKUITAS) Bandung Jurusan Akuntansi. Sedangkan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui :

1. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Studi

Dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan, penulis mengharapkan bahwa laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Proses dan hasil selama praktik kerja lapangan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dengan membandingkan antara teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan kenyataan yang dihadapi di dunia kerja.

2. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi dan/atau masukan bagi Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung untuk mengadakan peningkatan serta perbaikan demi menunjang kelancaran aktivitas dan kemajuan instansi.

3. Akademik

Sebagai bahan panduan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, serta diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap mahasiswa.

4. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang membacanya.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan studi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai objek penelitian dengan cara membandingkan antara teori-teori yang ada dengan fakta yang terjadi secara nyata serta menguraikan suatu masalah yang diteliti dalam suatu keadaan serta berusaha menyampaikan fakta-fakta yang jelas dan lengkap secara sistematis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi melalui wawancara dan observasi pada bagian yang terkait di Disyanjak Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari kajian terhadap literatur-literatur yang dipandang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang menjadi kajian dan objek penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan data yang sesuai dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek instansi yang akan diteliti melalui pengamatan dan pencatatan yang diperoleh kebenarannya.

b. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi lisan yang tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti pada Dinas Pelayanan Pajak (Disyajak) Kota Bandung.

c. Dokumen

Yaitu sesuatu yang tertulis /tercatat yang dipakai sebagai bukti/keterangan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

3. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data yang dilakukan dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

- a. Data primer tentang pengendalian internal persediaan barang habis pakai yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian disusun.
- b. Data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan tentang arti dari data tersebut.
- c. Setelah data tersebut dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan disajikan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang beralamat di Jl. Wastukencana No.02 Bandung, Telepon (022)-4235052.

